



Katalog : 9302002.71

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

MENURUT PENGGUNAAN Sulawesi Utara

*Gross Regional Domestic Product of Sulawesi Utara
By Expenditure*



Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Utara

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI SULAWESI UTARA
MENURUT PENGGUNAAN
2000 – 2007

*Gross Domestic Regional Bruto of Sulawesi Utara
by Expenditure
2000-2007*

Nomor Katalog : 9302002.71
ISBN : 979-488-520-7
Nomor Publikasi : 71550.0805
Ukuran Buku : A4
Jumlah Halaman : 43

Naskah:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh:
BPS Provinsi Sulawesi Utara, Manado-Indonesia

Dicetak Oleh:
BPS Provinsi Sulawesi Utara, Manado-Indonesia

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

Kata Pengantar

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Utara Menurut Penggunaan 2000-2007 merupakan lanjutan dari publikasi sebelumnya yang menggunakan tahun dasar 2000. Publikasi tersebut memberikan gambaran umum terutama tentang perkembangan berbagai kinerja perekonomian Sulawesi Utara berdasarkan PDRB menurut penggunaan selama periode 2000-2007 atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000.

Materi yang disajikan diantaranya mengenai konsep, definisi, dan uraian ringkas tiap komponen PDRB menurut penggunaan, yang dilengkapi dengan beberapa tabel dan gambar pendukung.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, sehingga dapat diterbitkannya publikasi ini disampaikan terima kasih. Berbagai upaya penyempurnaan telah dilakukan dalam penyusunan publikasi ini, namun disadari bahwa masih banyak kekurangannya, baik dari segi materi maupun cara penyajiannya. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak merupakan masukan yang berharga guna perbaikan publikasi ini di masa mendatang.

Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Manado, Oktober 2008

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI UTARA



Drs. Jasa Bangun, MSi
NIP. 340005025

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	v
I. Pendahuluan	1
1.1 PDRB Menurut Penggunaan	1
1.2 Perubahan Tahun Dasar	3
II. Ruang Lingkup dan Definisi	5
2.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.....	5
2.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nonprofit	6
2.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	9
2.5 Perubahan Stok	11
2.6 Ekspor dan Impor	11
III. Metode Penghitungan dan Sumber Data	13
3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.....	13
3.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nonprofit	14
3.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14
3.4 Pembentukan Model Tetap Bruto	15
3.5 Perubahan Stok	15
3.6 Ekspor dan Impor	16
IV. Tinjauan PDRB Menurut Penggunaan	17
4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	18
4.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nonprofit	20
4.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	22
4.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	23
4.5 Ekspor dan Impor Barang dan Jasa	24

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 4.1 Konsumsi Lembaga Swasta Non Profit, 2000-2007	21
Tabel 4.2 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 2000-2007	22
Tabel 4.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto, 2000-2007	23

<http://sulut.bps.go.id>

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Menurut Penggunaan	17
Gambar 4.2 Kontribusi Komponen PDRB Menurut Penggunaan, 2007	18
Gambar 4.3 Kontribusi Sub-Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	19
Gambar 4.4 Laju Pertumbuhan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	20
Gambar 4.5 Laju Pertumbuhan Konsumsi Lembaga Swasta Nonprofit	21
Gambar 4.6 Kontribusi Ekspor dan Impor Barang dan Jasa	25

Daftar Lampiran

	Halaman
Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku, 2000-2007 (dalam jutaan rupiah)	27
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2000-2007 (dalam jutaan rupiah)	28
Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku, 2000-2007 (Persen)	29
Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2000-2007 (Persen)	30
Tabel 5. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (2000 = 100)	31
Tabel 6. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000, (2000 = 100)	32
Tabel 7. Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Tahun Sebelumnya = 100)	33
Tabel 8. Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Tahun Sebelumnya = 100)	34
Tabel 9. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto	35
Tabel 10. Laju Pertumbuhan Ekonomi	36

BAB I

PENDAHULUAN

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi makro yang semakin penting keberadaannya, baik di tingkat nasional maupun regional, di mana penghitungannya dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi (*production approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*) dan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*).

Tersedianya data PDRB secara rinci dan berkesinambungan akan membantu perencana dalam mengevaluasi hasil pembangunan serta merencanakan pembangunan di masa yang akan datang, khususnya di bidang ekonomi .

1.1 PDRB MENURUT PENGGUNAAN

PDRB yang dihitung melalui pendekatan produksi menjelaskan bagaimana PDRB dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah. Penghitungan PDRB yang demikian disebut sebagai PDRB menurut sektor atau biasa disebut sebagai PDRB dari sisi penyediaan (*supply side*).

PDRB yang dihitung melalui pendekatan pengeluaran menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah digunakan atau dimanfaatkan, baik untuk memenuhi permintaan domestik di suatu wilayah maupun untuk memenuhi kebutuhan penduduk di luar wilayah tersebut. PDRB yang demikian disebut PDRB menurut penggunaan atau menurut pengeluaran (*Gross Regional Domestic Product by Expenditure*), atau bisa juga disebut sebagai PDRB dari sisi permintaan (*demand side*).

Pada garis besarnya permintaan akan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi, bila dilihat dari segi penggunaannya, digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksi, yang disebut dengan konsumsi antara (*intermediate consumption*).

- b. Barang dan jasa yang termasuk dalam konsumsi antara, akan habis dalam proses produksi, sedangkan barang dan jasa yang termasuk dalam konsumsi akhir meliputi:
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga
 2. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nonprofit
 3. Pengeluaran konsumsi pemerintah
 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
 5. Perubahan stok
 6. Ekspor dan impor

Barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi permintaan akhir, tidak saja berasal dari produksi domestik, tetapi juga berasal dari impor baik dari luar negeri maupun dari wilayah lain. Secara ringkas keadaan tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :

$$Y + M = C + IF + IS + E$$

di mana :

- Y = Produk Domestik
- M = Impor
- C = Konsumsi RT, Pemerintah dan Lembaga Swasta Nirlaba
- IF = PMTB
- IS = Perubahan Stok
- E = Ekspor

Oleh karena tujuannya adalah menghitung produk domestik (pendapatan yang ditimbulkan di daerah tersebut), maka persamaan tersebut di atas dapat diturunkan menjadi :

$$Y = C + IF + IS + E - M$$

Dengan demikian, dalam penyajian PDRB menurut penggunaan harus dihitung komponen-komponen permintaan akhir.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR (*REBASING*)

Untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan PDRB, dipakai suatu tahun dasar yang ditetapkan sebagai dasar rujukan untuk penghitungan PDRB, di mana tahun dasar tersebut digunakan sebagai pijakan untuk menghitung perubahan-perubahan agregat ekonomi, seperti nilai riil, struktur ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi dan indeks implisit, baik untuk PDRB maupun masing-masing komponen permintaan akhir. PDRB juga dipakai sebagai waktu rujukan atau menjadi tahun konstan dalam pengukuran PDRB terutama jika ingin mengesampingkan aspek harga.

Dalam periode PJPT pertama, penghitungan PDRB telah mengalami empat kali pergantian tahun dasar yakni 1960, 1973, 1983 dan 1993. Pada publikasi tahun lalu penghitungan PDRB masih menggunakan tahun dasar 1993, akan tetapi pada tahun ini penghitungan nilai PDRB sudah menggunakan tahun dasar 2000.

Adapun beberapa alasan yang melatarbelakangi penggantian tahun dasar 1993 menjadi 2000 adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan ekonomi dunia selama periode 1993-2000 yang diwarnai globalisasi tentunya akan berpengaruh kepada perekonomian domestik. Terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 juga berdampak kepada perubahan struktur perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, bisa dinyatakan bahwa struktur ekonomi tahun 2000 telah berbeda dengan tahun 1993 sehingga seri data PDRB tahun 1993 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi yang terjadi.
2. Perekonomian Indonesia selama tahun 2000 dipandang relatif stabil.
3. Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan yang baru "Sistem Neraca Nasional" menyatakan bahwa estimasi PDRB atas dasar harga konstan sebaiknya dimutakhirkan secara periodik dengan menggunakan tahun referensi yang berakhiran 0 dan 5 dan hal ini juga sudah didukung oleh komitmen pimpinan BPS negara Asean tahun 2000. Hal itu dimaksudkan agar besaran angka-angka PDRB dapat saling diperbandingkan antar wilayah dan antar waktu guna keperluan analisis kinerja perekonomian dunia.

4. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) maupun Indeks Harga Konsumen (IHK) menggunakan tahun dasar yang baru, yaitu tahun dasar 2000. Penyempurnaan metodologi berikut perluasan cakupan komoditinya akan menghasilkan suatu *series* IHPB dan IHK baru yang akan digunakan sebagai deflator dalam penghitungan estimasi PDB sektoral maupun penggunaan.
5. Data dasar (*raw data*) baik harga (*price*) maupun volume (*quantum*) tahun 2000 secara rinci pada masing-masing sektor ekonomi relatif lebih lengkap dan berkelanjutan. Hal ini dimungkinkan karena departemen/kementerian dan instansi pemerintah lainnya juga ikut membangun statistik bagi keperluan perencanaan sektoralnya masing-masing. Dengan dukungan data-data yang lebih lengkap, terinci, dan berkesinambungan, diharapkan estimasi PDRB dengan tahun dasar 2000 dapat disusun lebih akurat dan konsisten.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN DEFINISI

2.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga meliputi semua pengeluaran atas pembelian barang dan jasa (barang tahan lama maupun barang tak tahan lama) baik yang diperoleh dari pihak lain maupun yang dihasilkan sendiri, dikurangi nilai penjualan neto (penjualan dikurangi pembelian) barang-barang bekas dan barang sisa, yang dilakukan oleh suatu rumah tangga untuk periode tertentu (biasanya satu tahun).

Yang dimaksud dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran untuk bahan makanan, minuman, pakaian, bahan bakar dan jasa-jasa, pengeluaran untuk barang yang tidak ada duanya (tidak di produksi kembali) seperti karya seni, barang antik. Barang tahan lama seperti mobil, motor, furnitur, radio, kulkas, televisi, dll serta pengeluaran untuk pemeliharaan kesehatan, pendidikan, rekreasi, pengangkutan dan jasa-jasa lainnya juga termasuk di dalam konsumsi rumah tangga.

Pembelian rumah tidak termasuk pengeluaran konsumsi, tetapi pengeluaran atas rumah yang ditempati seperti sewa rumah, perbaikan ringan, rekening listrik, air, telepon, dll, merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Untuk barang yang mempunyai kegunaan ganda, maka pembelian dan biaya operasional barang tersebut harus di alokir secara proporsional terhadap masing-masing kegiatan yang dilakukan, misalnya mobil, selain digunakan untuk keperluan rumah tangga juga dipakai sebagai penunjang dalam kegiatan usaha rumah tangga (sebagai alat angkut para pegawai dari perusahaan yang dimiliki oleh anggota rumah tangga). Sama halnya dengan pengeluaran terhadap sewa, bahan bakar, listrik, air, dan jasa lainnya yang dipakai untuk bermacam-macam aktivitas oleh anggota rumah tangga, juga harus diperkirakan pengeluarannya untuk masing-masing kegiatan tersebut terhadap sumbangan yang diberikan.

Pengeluaran pegawai yang merupakan biaya antara bagi perusahaan tidak dianggap sebagai konsumsi rumah tangga, misalnya, pembelian alat-alat kerja seperti lampu senter, bahan peledak dan lain-lain oleh buruh tambang untuk melakukan pekerjaannya. Ada dua konsep yang dipakai dalam penghitungan pengeluaran konsumsi rumah tangga :

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang terbatas pada wilayah domestik atau *region*.
2. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang terbatas pada rumah tangga penduduk suatu *region*.

Pengertian konsep pertama adalah pengeluaran oleh anggota rumah tangga di suatu *region*, tidak terkecuali oleh penduduk atau bukan penduduk *region* tersebut. Jadi dalam hal ini semua pengeluaran oleh anggota rumah tangga staf kedutaan asing, staf perwakilan daerah, anggota militer dan lain-lain yang berada di suatu wilayah, serta pengeluaran turis asing adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam *region* tersebut. Pengertian konsep yang kedua adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga di dalam *region* ditambah dengan pembelian langsung oleh rumah tangga penduduk di luar *region*, dikurangi dengan pengeluaran rumah tangga bukan penduduk yang dilakukan di dalam *region* tersebut.

Pengeluaran rumah tangga yang sedang mengadakan perjalanan dinas, yang pengeluarannya dibiayai oleh perusahaan atau kantor, tidak termasuk dalam konsumsi rumah tangga karena merupakan biaya antara dari perusahaan atau kantor yang bersangkutan. Konsep pengeluaran rumah tangga yang dipakai dalam komponen PDRB adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga penduduk (konsep kedua).

2.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nonprofit

Lembaga swasta non profit adalah lembaga swasta yang dalam operasinya tidak bertujuan mencari keuntungan. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta non profit meliputi semua pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, pembayaran upah dan gaji, penerimaan transfer, penyusutan dan pajak tidak langsung neto, dikurangi dengan penjualan barang-barang bekas/tak terpakai.

Lembaga swasta non profit terdiri dari lembaga/badan swasta yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, seperti organisasi serikat buruh, persatuan para ahli/persatuan profesi, organisasi politik, badan-badan keagamaan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan formal maupun non formal, badan-badan kesehatan dan organisasi-organisasi kesejahteraan masyarakat yang tujuan dari kegiatan tersebut tidak mencari untung.

Lembaga swasta non profit mungkin saja mempunyai badan hukum dan mungkin saja tidak. Lembaga/badan swasta non profit yang masalah keuntungannya dan pengawasannya sepenuhnya atau sebagian besar ditangani oleh pemerintah dan merupakan bagian kegiatan dari pemerintah, tidak termasuk di dalam lembaga ini.

2.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran pemerintah pusat dan daerah. Pengeluaran yang dimaksud adalah sama dengan nilai jasa yang dihasilkan untuk keperluan konsumsi sendiri. Nilai dari jasa ini adalah sebesar nilai produksi bruto dikurangi dengan jumlah penjualan barang dan jasa yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah.

Kegiatan pemerintah adalah menyediakan jasa pelayanan umum untuk masyarakat yang secara ekonomis sulit dinilai, seperti melaksanakan administrasi pemerintah, menjaga kestabilan keamanan negara, meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan mengatur kebijaksanaan perekonomian negara lainnya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya.

Kegiatan pemerintah meliputi kegiatan administrasi pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, termasuk juga administrasi pertahanan dan keamanan. Pemerintah daerah dalam hal ini meliputi pemerintah tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan tingkat desa, sedangkan pemerintah pusat mencakup semua badan/lembaga tinggi negara, departemen dan unsur departemen serta instansi lain beserta jajarannya di daerah sebagai dinas instansi vertikal.

Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan milik negara seperti Perum, Perjan, PT (Persero, PN) dan lainnya tidak termasuk dalam kegiatan pemerintah karena kegiatan-kegiatan ini telah tercakup dalam sektor yang bersangkutan atau lapangan usaha masing-masing.

Nilai barang dan jasa yang dikonsumsi sendiri secara langsung tidak mungkin dapat diperoleh karena produksi sektor ini tidak ada/tidak dijual. Oleh karena itu, besarnya nilai produksi yang dikonsumsi sendiri dapat diperkirakan dengan cara menghitung besarnya biaya yang dikeluarkan dalam produksi. Biaya yang dimaksud adalah:

1. Belanja pegawai, yaitu pengeluaran pemerintah untuk membayar upah dan gaji pegawai baik berbentuk uang maupun barang, termasuk belanja pensiun, uang lembur, honorarium, lauk pauk dan belanja pegawai lainnya.
Belanja pegawai mencakup pegawai pemerintah pusat dan pegawai pemerintah daerah, baik sipil maupun militer.
2. Belanja barang, yaitu pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa yang habis dipakai dalam proses produksi, mencakup semua biaya kantor seperti pembelian alat-alat tulis kantor, pembayaran listrik, telepon, air, dan gas, belanja perjalanan dinas pegawai, biaya perbaikan kendaraan dinas, perbaikan kantor dan rumah dinas serta pengeluaran rutin lainnya. Pembelian terhadap barang-barang modal tidak termasuk dalam belanja barang, kecuali pembelian barang-barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan.
3. Pengeluaran pemerintah untuk penyediaan barang-barang strategi seperti bahan pangan dan bahan bakar tidak dimasukkan dalam pengeluaran konsumsi pemerintah, akan tetapi dimasukkan sebagai stok.
4. Pengeluaran penyusutan barang-barang modal pemerintah. Besarnya penyusutan diperkirakan dengan menggunakan persentase tertentu terhadap belanja pegawai.

Apabila keempat macam pengeluaran di atas dijumlahkan dan kemudian dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa pemerintah, maka hasilnya merupakan jumlah pengeluaran konsumsi pemerintah.

Hasil penjualan barang dan jasa meliputi penerimaan barang dan jasa yang dijual pemerintah kepada masyarakat, baik yang pada dasarnya tidak mengambil keuntungan atau kemungkinan dibawah harga pokok, maupun penerimaan penjualan hasil produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan sebagai unit industri (hasil penjualan karcis masuk gedung museum, gedung kesenian, kebun binatang, yang dikelola oleh pemerintah) penjualan buku publikasi, bibit pertanian dan sebagainya.

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pengertian konsep Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam suatu *region* adalah semua barang modal baru yang digunakan atau di pakai sebagai alat untuk proses produksi di suatu wilayah. Barang-barang modal tersebut dapat diperoleh dengan cara membeli dari luar wilayah, ataupun dari pengadaan di wilayah itu sendiri.

Jenis barang yang dikategorikan ke dalam barang-barang modal adalah barang-barang yang mempunyai umur satu tahun atau lebih. Pemakaian adalah penggunaan barang-barang modal tersebut sebagai alat yang tetap dalam proses produksi. Barang-barang yang tidak dapat diproduksi kembali, seperti tanah, cadangan mineral, tidak termasuk dalam PMTB. Selanjutnya pengeluaran untuk meningkatkan penggunaan tanah seperti pembukaan hutan untuk dijadikan areal perkebunan, daerah pemukiman, bendungan, dll, serta untuk perluasan areal pertambangan, semuanya adalah merupakan pengeluaran untuk PMTB.

Pengeluaran untuk perbaikan barang-barang modal yang mengakibatkan bertambahnya umur pemakaian atau menambah kapasitas produksi dari barang-barang modal tersebut juga merupakan pengeluaran untuk PMTB. Jadi pengeluaran yang bersifat rutin, seperti pembelian barang-barang yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi, tidak termasuk kategori PMTB. Penjualan neto dari barang-barang modal bekas dan barang-barang modal afkiran dari dalam wilayah, juga tidak termasuk PMTB karena barang tersebut sudah dihitung sebagai barang modal pada pertama kali dibeli.

Lain halnya dengan barang modal bekas yang dibeli dari luar wilayah adalah merupakan PMTB karena di dalam wilayah barang tersebut belum pernah dihitung. Pembelian atau pembuatan barang tahan lama untuk keperluan perlengkapan militer, seperti barang-barang untuk pertahanan, tank, persenjataan, bangunan dan barang-barang lainnya, tidak termasuk dalam pembentukan modal karena bersifat konsumtif.

Pembentukan Modal Tetap Bruto mencakup:

1. Pembentukan modal tetap di sektor bangunan yang terdiri atas :
 - a. Bangunan tempat tinggal.
 - b. Bangunan bukan tempat tinggal.
 - c. Bangunan atau konstruksi lainnya, seperti: jalan, jembatan, irigasi, pembangkit tenaga listrik dan jaringannya, instalasi telekomunikasi, pemancar televisi, bandar udara, pelabuhan laut/sungai, jaringan pipa untuk minyak, gas, air dll.
2. Pembentukan modal tetap dalam mesin dan alat-alat perlengkapan, yang terdiri atas:
 - a. Alat-alat transpor, seperti: kapal laut, pesawat udara, kereta api, bus, truk, dll.
 - b. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk industri, listrik dan pertambangan
 - c. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian.
 - d. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pembuatan jembatan, jalan, dll.
 - e. Mesin-mesin dan perabot untuk keperluan kantor, toko, hotel, restoran, rumah sakit, dll.
3. Perluasan perkebunan dan penanaman baru untuk tanaman keras. Pengertian/konsep tanaman keras disini adalah bermacam-macam tanaman yang hasilnya baru akan diperoleh setelah berumur satu tahun atau lebih, termasuk pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh perkebunan besar selama perkebunan itu belum mendatangkan hasil/kegiatan, dan penanaman kembali (reboisasi) yang dilakukan pemerintah/perusahaan.
4. Penambahan ternak yang khusus dipelihara untuk diambil susunya, bulunya atau dipakai tenaganya, kecuali ternak yang dipelihara untuk dipotong.
5. Margin perdagangan atau makelar, *service charge* dan ongkos-ongkos pemindahan hak milik dalam transaksi jual beli tanah, sumber mineral, hak perusahaan hutan, hak paten, hak cipta termasuk dalam pembentukan modal tetap.

Dalam hal bangunan atau konstruksi, dikarenakan jangka waktu penyelesaiannya ada yang lebih dari satu tahun sehingga bangunan tersebut pada waktu penghitungan pembentukan modal masih dalam pengerjaan (belum selesai seluruhnya), maka yang harus dihitung adalah bagian yang sudah selesai saja dari bangunan tersebut dengan memperkirakan nilainya. Nilai perkiraan dari bangunan ini merupakan pembentukan modal tetap pada tahun tersebut. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan yang dalam proses pembuatan, tidak termasuk dalam penghitungan modal tetap bruto tetapi merupakan stok dari produsennya.

2.5 Perubahan Stok

Stok adalah persediaan barang-barang pada akhir tahun yang berasal dari pembelian yang akan dipakai sebagai input pada suatu kegiatan ekonomi atau untuk dijual lagi, maupun barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum dijual, baik barang yang sudah jadi maupun yang sedang dalam proses. Pemerintah adalah salah satu pemegang stok barang keperluan strategis, seperti bahan pangan yang akan dikeluarkan ke pasaran pada waktu krisis. Pemegang stok yang lain adalah produsen dan pedagang. Stok pada produsen pada umumnya berupa bahan mentah, barang-barang atau alat-alat yang diproduksi tetapi masih dalam proses atau barang-barang yang belum dipasarkan.

2.6 Ekspor Dan Impor

Ekspor dan impor meliputi transaksi barang dan jasa antara masyarakat suatu *region* dengan masyarakat wilayah lain (termasuk dengan negara lain). Transaksi tersebut meliputi ekspor dan impor barang, jasa pengangkutan, jasa komunikasi, jasa pariwisata, jasa asuransi dan berbagai jasa lainnya, seperti jasa perdagangan yang diterima oleh pedagang wilayah tersebut yang kegiatannya mengadakan transaksi dari beberapa barang tertentu, seperti barang dan jasa yang langsung di beli di pasar domestik yang dilakukan oleh bukan penduduk wilayah tersebut. Transaksi barang dan jasa yang dimaksud adalah semua barang dan jasa yang meliputi batas geografis suatu wilayah atau negara, termasuk daerah pabean dan daerah bebas pajak.

Penjualan dan pembelian pesawat terbang dan kapal laut yang baru maupun yang bekas, ke atau dari suatu negara atau wilayah lain merupakan kegiatan ekspor dan impor barang. Barang-barang keperluan pelayaran atau penerbangan yang di beli pada waktu merapat atau mendarat di pelabuhan luar negeri atau wilayah dan ikan yang langsung dijual oleh kapal-kapal penangkap ikan milik penduduk atau wilayah kepada kapal asing atau wilayah lain, adalah merupakan transaksi barang dan jasa yang harus dimasukkan dalam ekspor dan impor. Barang-barang yang melintasi batas geografis suatu wilayah, tetapi hanya merupakan tempat persinggahan saja dalam perjalanan menuju ke suatu tempat, misalnya, barang-barang untuk peragaan, barang-barang sebagai bahan penyelidikan, barang-barang milik turis atau penumpang, tidak termasuk kegiatan ekspor dan impor.

<http://sulut.bps.go.id>

BAB III

METODE PENGHITUNGAN DAN SUMBER DATA

3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Sumber data utama untuk memperkirakan nilai konsumsi rumah tangga adalah berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Provinsi Sulawesi Utara. Besaran konsumsi di dapat dari hasil pengolahan yang dilakukan oleh BPS Pusat, sedangkan untuk harga setiap jenis bahan yang dikonsumsi, nilainya diperoleh dari hasil pengolahan oleh BPS Provinsi Sulawesi Utara.

Dari hasil Susenas, diperoleh rata-rata konsumsi bahan makanan per kapita per minggu dan rata-rata nilai konsumsi non makanan per kapita per bulan. Untuk memperoleh nilai konsumsi bahan makanan sebulan adalah dengan cara mengalikan nilai konsumsi per kapita per minggu dengan angka tiga puluh yang kemudian dibagi dengan angka tujuh, sedangkan untuk memperkirakan nilai konsumsi bahan makanan dan non makanan setahun diperoleh dengan cara mengalikan nilai konsumsi per kapita per bulan dengan angka dua belas kemudian dikalikan kembali dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Perkiraan nilai konsumsi rumah tangga untuk tahun yang tidak tersedia data Susenas adalah dengan membuat kecenderungan pergerakan nilai konsumsi tahunan dan dengan memperhatikan kenaikan laju inflasi. Perhitungan ini berlaku baik untuk bahan makanan maupun non makanan.

Nilai konsumsi rumah tangga non makanan atas dasar harga konstan 2000, diperoleh dengan cara mendeflasikan nilai berlakunya, yaitu membagi konsumsi harga berlaku dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum pada tahun yang bersangkutan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang berasal dari Susenas ini, telah dilengkapi dengan perkiraan besarnya konsumsi makanan/minuman yang di konsumsi di luar rumah.

3.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Non Profit

Perkiraan besarnya nilai konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung diperoleh dari hasil penghitungan pendapatan regional menurut lapangan usaha sektor jasa-jasa. Sektor jasa-jasa tersebut meliputi jasa sosial kemasyarakatan yang dikategorikan sebagai lembaga swasta yang tidak mencari untung, seperti kegiatan sarana kesehatan, panti asuhan, sekolah dan tempat ibadah, sedangkan untuk kegiatan lainnya seperti dokter praktek, bidan/dukun bayi dan dokter gigi tidak dimasukkan dalam kategori ini.

Dari hasil penghitungan nilai PDRB menurut lapangan usaha, diperoleh perkiraan nilai konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000.

3.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Data mengenai belanja pegawai, belanja barang dan belanja rutin lainnya, serta perkiraan belanja pembangunan yang merupakan belanja rutin, diperoleh dari realisasi pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah pusat diperoleh dari Kantor Perbendaharaan Negara, sedangkan untuk pengeluaran pemerintah dalam hal ini daerah otonom tingkat I, tingkat II, dan tingkat desa, diperoleh dari daftar K.1, K.2 dan K.3.

Kalau diteliti lebih lanjut, pengeluaran pemerintah terdiri dari dua kelompok, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi dan pengeluaran lainnya. Dari kelompok pengeluaran rutin yang dihitung sebagai pengeluaran konsumsi pemerintah adalah belanja pegawai, belanja barang dan pengeluaran rutin lainnya, sedangkan yang lainnya tidak dimasukkan karena merupakan transfer.

Dari kelompok pengeluaran pembangunan, pengeluaran yang tujuan utamanya untuk peningkatan fisik di segala bidang merupakan investasi pemerintah, sedangkan pembiayaan yang bersifat rutin, seperti pengeluaran untuk riset dan pengeluaran untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dimasukkan sebagai konsumsi pemerintah.

3.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Ditinjau dari sudut kepemilikan, PMTB dapat dihitung berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh masing-masing lapangan usaha (sektor), sedangkan kalau ditinjau dari jenis barang modal itu sendiri, maka pembentukan modal dapat dihitung berdasarkan arus barang.

Perkiraan PMTB atas dasar harga yang berlaku, diperoleh dengan cara menghitung nilai barang-barang modal yang masuk ke *region* dan barang modal yang masuk antar *region*/antar pulau ditambahkan dengan persentase tertentu terhadap nilai produksi bruto sektor konstruksi/bangunan.

Perkiraan nilai PMTB atas dasar harga konstan tahun 2000, diperoleh dengan cara mendeflasikan nilai PMTB (nilai barang impor) atas dasar harga yang berlaku dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) impor dan dengan IHPB sektor industri untuk barang modal antar pulau.

3.5 Perubahan Stok

Perubahan stok pada suatu tahun diperoleh dari seluruh nilai stok pada akhir tahun dikurangi dengan seluruh nilai stok pada akhir tahun sebelumnya (pada awal tahun yang bersangkutan). Dalam menghitung perubahan stok dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu:

1. Metode Langsung

Nilai stok diperoleh dari setiap kegiatan dan jenis barang yang dikumpulkan melalui sensus dan survei. Berdasarkan laporan neraca keuangan perusahaan hasil survei tahunan, diperoleh nilai stok pada awal tahun dan akhir tahun yang kemudian dinilai dengan rata-rata harga pasar pada periode tahun perhitungan tersebut.

2. Metode Tidak Langsung (Metode Arus Barang)

Nilai stok diperoleh dengan menghitung stok awal dan stok akhir dari tiap jenis barang. Data seperti ini hanya tersedia untuk beberapa jenis barang. Oleh karena itu, komponen perubahan stok diestimasi berdasarkan residual dari PDRB yang dihitung secara sektoral dikurangi komponen-komponen yang sudah dihitung dengan data yang tersedia.

Penghitungan perubahan stok ditaksir sebagai residual karena tidak tersedianya data yang diperlukan untuk membuat perkiraan perubahan stok. Dengan demikian, stok merupakan sisa, yaitu PDRB yang telah dihitung menurut lapangan usaha dikurangi konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, PMTB, dan ekspor neto (ekspor-impor) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

3.6 Ekspor Dan Impor

Data yang tersedia mengenai ekspor dan impor di tingkat *region* masih sangat terbatas. Ekspor dan impor ditingkat *region* ini meliputi transaksi yang dilakukan langsung dengan luar negeri dan antar pulau/antar provinsi. Dari nilai ekspor dan impor luar negeri maupun antar pulau masing-masing tahun diperoleh nilai ekspor dan impor atas dasar harga berlaku.

Untuk memperoleh nilai ekspor atas dasar harga konstan 2000 dengan cara sebagai berikut:

- a. Nilai ekspor *dideflate* dengan IHPB umum ekspor tanpa minyak.
- b. Nilai impor *dideflate* dengan IHPB umum kelompok impor.

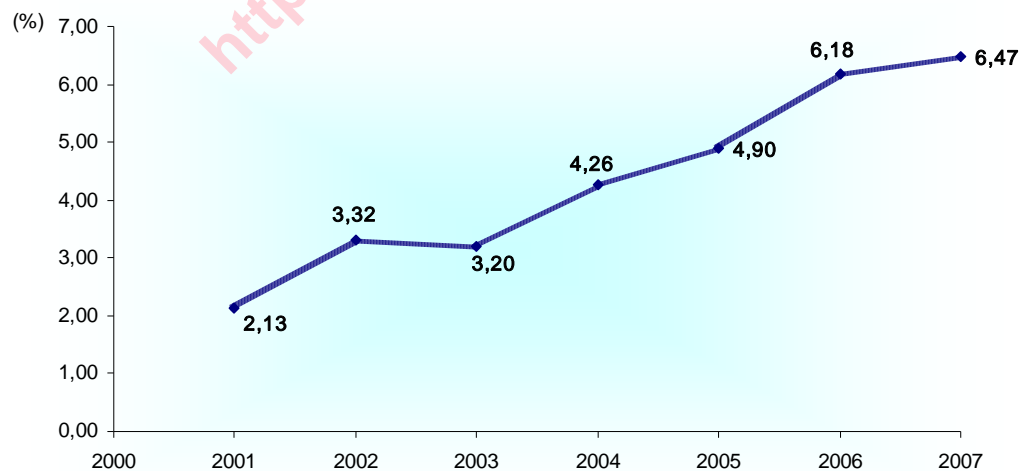
Nilai barang yang keluar antar pulau/*region* atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara *mendeflate* masing-masing dengan IHPB umum. Data mengenai ekspor dan impor luar negeri diperoleh dari statistik tahunan ekspor dan impor terbitan dari Departemen Perdagangan, sedangkan untuk barang yang keluar dan masuk antar pulau/provinsi diperoleh dengan cara menghitung selisih produksi domestik dengan konsumsi domestik. Konsumsi domestik terdiri dari konsumsi rumah tangga dan konsumsi industri.

BAB IV

Tinjauan PDRB Menurut Penggunaan

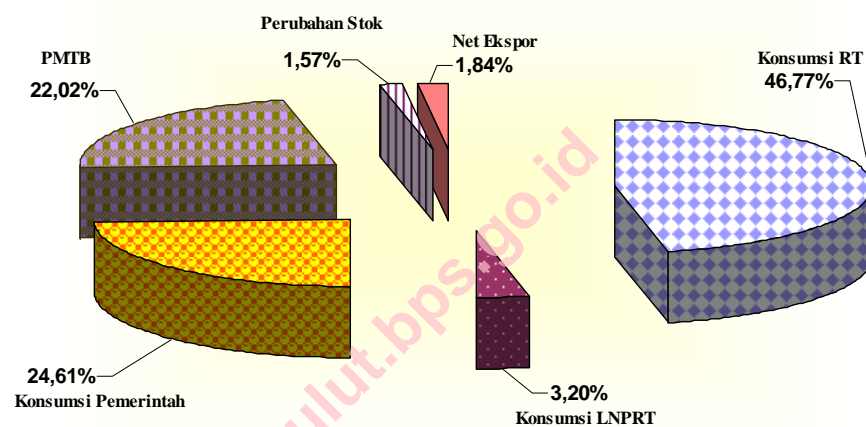
Laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang diukur berdasarkan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2000 selama periode 2000-2007 selalu mengalami peningkatan. Nilai tambah bruto secara riil (atas dasar harga konstan 2000) tahun 2007 adalah senilai Rp 14,41 triliun, meningkat dari Rp 13,53 triliun pada tahun 2006, atau tumbuh sebesar 6,47 persen (lebih tinggi dibandingkan tahun 2006 yang tumbuh sebesar 6,18 persen).

Selama tahun 2007 semua komponen PDRB menurut penggunaan mengalami pertumbuhan positif. Komponen pembentukan modal tetap bruto yang tumbuh sebesar 19,08 persen merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2007, dengan sumbangan sebesar 3,58 persen. Hal ini didorong oleh pembangunan berbagai infrastruktur menyambut World Ocean Conference (WOC) 2009 dan Manado Kota Pariwisata Dunia (MKDP) 2010.



Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Menurut Penggunaan

Dilihat dari pola distribusinya, peranan tiap komponen PDRB menurut penggunaan atas dasar harga berlaku tahun 2007 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2006. Tiga komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang meningkat dari 45,69 persen di tahun 2006 menjadi sebesar 46,77 persen, konsumsi pemerintah meningkat dari 23,95 persen menjadi 24,61 persen, dan pembentukan modal tetap bruto meningkat dari 18,76 persen menjadi 22,02 persen. Komponen lainnya seperti pengeluaran konsumsi pemerintah dan net ekspor menyumbang kurang dari 10 persen terhadap pembentukan PDRB.



Gambar 4.2 Kontribusi Komponen PDRB Menurut Penggunaan, 2007

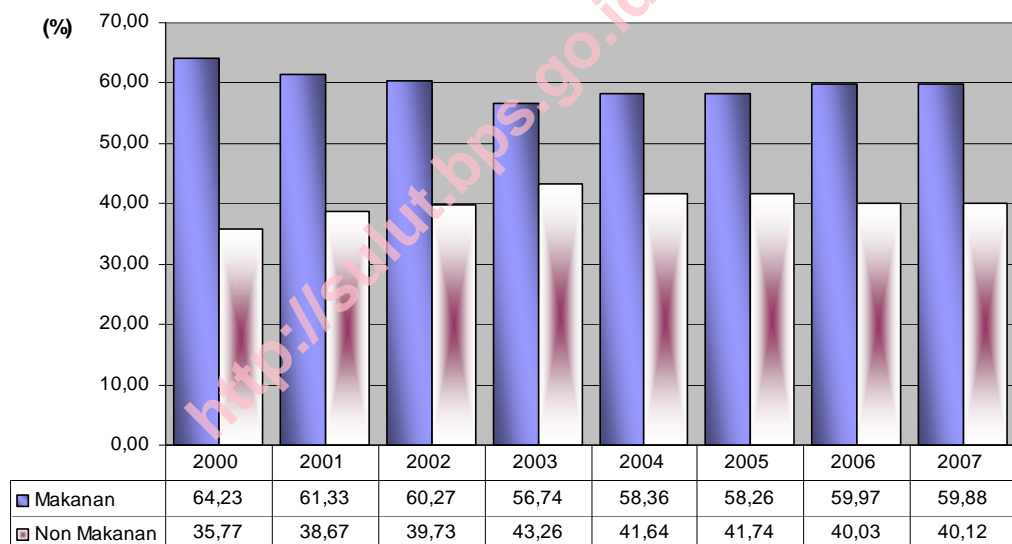
4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Nilai tambah bruto komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga secara riil meningkat dari Rp 5,81 triliun di tahun 2006 menjadi Rp 5,96 triliun di tahun 2007, atau tumbuh sebesar 2,59 persen. Sementara atas dasar harga berlaku, pengeluaran konsumsi rumah tangga tercatat senilai Rp 11,35 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 9,83 triliun.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perekonomian Sulawesi Utara tahun 2007 masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Selama periode 2000-2007, pengeluaran konsumsi rumah tangga selalu memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB. Sumbangan terbesar komponen pengeluaran rumah tangga terhadap PDRB terjadi di tahun 2002 yaitu sebesar 48,88 persen dan terkecil di tahun 2005 sebesar 45,41 persen.

Nilai tambah bruto secara riil sub-komponen pengeluaran konsumsi makanan tahun 2007 adalah senilai Rp 3,88 triliun dan non makanan senilai Rp 2,08 triliun. Sementara atas dasar harga berlaku, sub-komponen pengeluaran konsumsi makanan tercatat senilai Rp 6,80 triliun dan non makanan sebesar Rp 4,55 triliun.

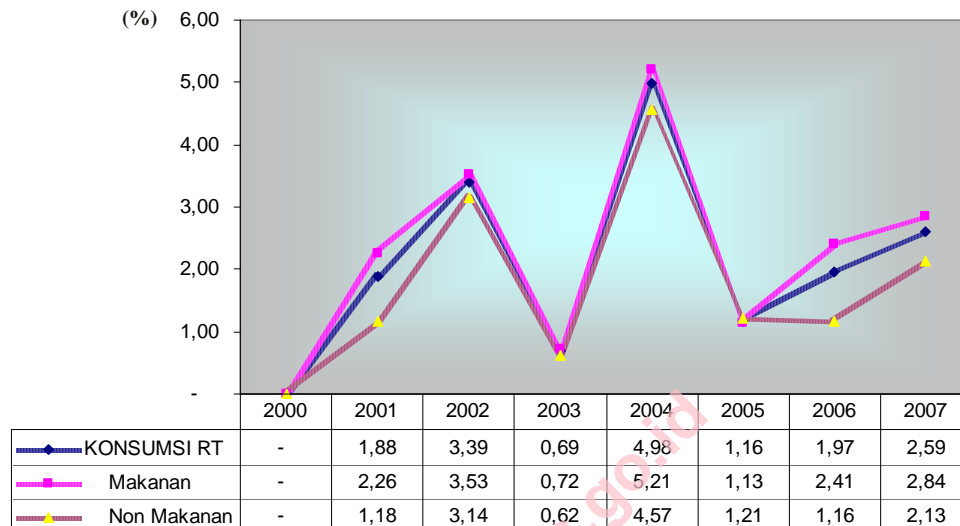
Selama periode 2000-2007 sub-komponen pengeluaran konsumsi makanan memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga. Tingginya kontribusi sub-komponen pengeluaran konsumsi makanan terhadap total pengeluaran konsumsi rumah tangga di tahun 2007 yang sebesar 59,88 persen dipicu oleh kelompok komoditi padi-padian, sayur-sayuran, dan ikan. Sementara untuk sub-komponen pengeluaran konsumsi non makanan dipicu oleh kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga, barang dan jasa, serta barang-barang tahan lama.



Gambar 4.3 Kontribusi sub komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga

Selama tahun 2000-2007, laju pertumbuhan terendah terjadi di tahun 2003, yaitu sebesar 0,69 persen dan tertinggi di tahun 2004, yaitu sebesar 4,98 persen. Tahun 2007, laju pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga mencapai 2,59 persen, sub-komponen pengeluaran konsumsi makanan 2,84 persen dan non makanan 2,13 persen.

Dari pertumbuhan ekonomi yang sebesar 6,47 persen, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memberikan sumbangan sebesar 1,18 persen, sub-komponen pengeluaran konsumsi makanan 0,78 persen dan non makanan 0,39 persen.



Gambar 4.4 Laju Pertumbuhan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

4.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Non Profit

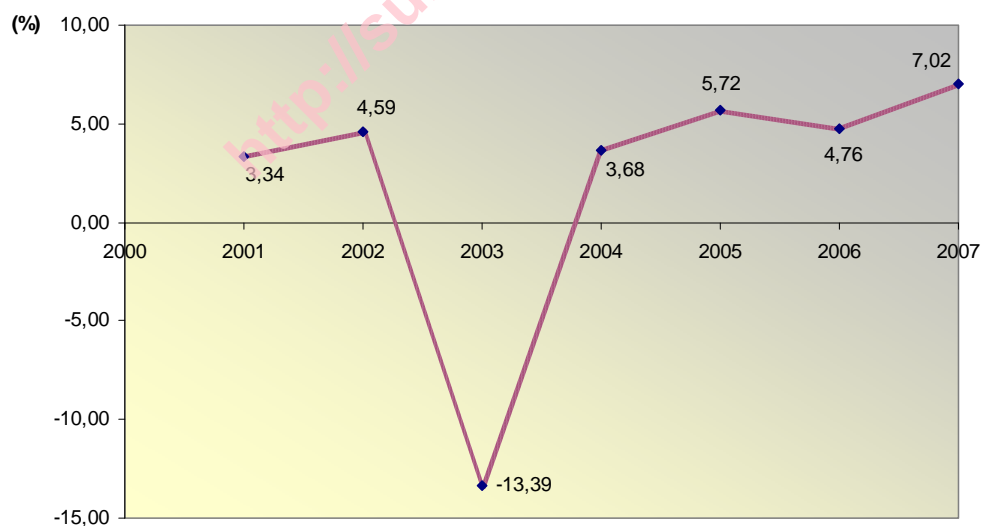
Selama periode 2000-2007 nilai tambah bruto komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit cenderung meningkat, walaupun di tahun 2003 nilai konsumsinya sempat mengalami penurunan. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta non profit atas dasar harga berlaku tahun 2007 tercatat senilai Rp 775,84 miliar, meningkat dibandingkan tahun 2006 yang sebesar Rp 620,24 miliar dan secara riil nilai konsumsinya meningkat dari Rp 414,87 miliar menjadi Rp 443,99 miliar, atau tumbuh sebesar 7,02 persen.

Peranan lembaga swasta non profit dalam pembentukan PDRB menurut penggunaan atas dasar harga berlaku selama periode 2000-2007 terlihat masih relatif kecil, yaitu di bawah 4 persen. Kontribusi tertinggi terjadi tahun 2000, yakni sebesar 3,61 persen dan terendah di tahun 2006 sebesar 2,88 persen. Tahun 2007, peranannya terhadap PDRB kembali meningkat menjadi sebesar 3,20 persen.

Tabel 4.1 Konsumsi Lembaga Swasta Non Profit, 2000-2007

Uraian	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nilai PDRB (Miliar Rp)								
ADH Berlaku	385,94	422,11	461,49	432,73	494,14	566,92	620,24	775,84
ADH Konstan	385,94	398,85	417,15	361,29	374,60	396,03	414,87	443,99
Kontribusi (Persen)	3,61	3,58	3,53	3,06	3,14	3,02	2,88	3,20

Laju pertumbuhan konsumsi lembaga swasta non profit yang diukur dari perkembangan PDRB secara riil selama periode 2000-2007 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan terendah selama periode 2000-2007 terjadi di tahun 2003, yakni terkontraksi sebesar minus 13,39 persen. Memasuki tahun 2004, laju pertumbuhannya mengalami percepatan menjadi sebesar 3,68 persen, dan mencapai 5,72 persen di tahun 2005. Tahun 2006, laju pertumbuhannya melambat menjadi sebesar 4,76 persen namun kembali meningkat di tahun 2007 dan merupakan pertumbuhan tertinggi, yakni tumbuh sebesar 7,02 persen.



Gambar 4.5 Laju Pertumbuhan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Non Profit

4.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Nilai PDRB yang digunakan untuk keperluan konsumsi pemerintah selama periode 2000-2007, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2007, nilai tambah bruto komponen pengeluaran pemerintah atas dasar harga berlaku adalah senilai Rp 5,97 triliun (meningkat dari Rp 5,15 triliun pada tahun 2006) dan secara riil tercatat senilai Rp 3,21 triliun (meningkat dari Rp 3,15 triliun pada tahun 2006). Meningkatnya nilai konsumsi ini antara lain didorong oleh kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tahun 2007 sebesar kurang lebih 15 persen.

Sumbangan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap pembentukan PDRB menurut penggunaan selama tahun 2000-2007 selalu meningkat. Tahun 2000, kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap pembentukan PDRB adalah sebesar 15,14 persen, tahun 2001 dan 2002 kontribusinya menjadi sekitar 19 persen. Memasuki tahun 2003, kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah berada pada level di atas 20 persen, dan di tahun 2007 kontribusinya telah mencapai 24,61 persen.

Tabel 4.2 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, 2000-2007

Uraian	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nilai (Triliun Rp)								
ADH Berlaku	1,62	2,30	2,48	2,95	3,31	4,32	5,15	5,97
ADH Konstan 2000	1,62	2,23	2,28	2,69	2,88	3,06	3,15	3,21
Persentase								
Laju Pertumbuhan ¹⁾	-	37,90	1,92	18,01	7,28	6,27	2,80	1,93
Kontribusi ²⁾	15,14	19,52	18,97	20,85	21,07	23,01	23,95	24,61

1) Perhitungan atas dasar harga konstan 2000

2) Perhitungan atas dasar harga berlaku

Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah tahun 2007 tumbuh sebesar 1,93 persen, melambat dibandingkan tahun 2006 yang tumbuh sebesar 2,80 persen. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi tahun 2001 yaitu sebesar 37,90 persen dan terendah terjadi tahun 2002 sebesar 1,92 persen.

4.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto

PDRB yang digunakan untuk PMTB baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan selama tahun 2000-2007 selalu mengalami peningkatan. Investasi fisik di Sulawesi Utara tahun 2000 tercatat senilai Rp 1,75 triliun, meningkat menjadi Rp 1,98 triliun di tahun 2001 dan di tahun 2007 nilai investasi fisik yang terbentuk telah mencapai Rp 5,35 triliun. Peningkatan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya investor yang masuk ke Sulawesi Utara menjelang WOC 2009 dan MKDP 2010, ditandai dengan pembangunan berbagai infrastruktur seperti hotel, pusat-pusat perbelanjaan/mal, realisasi pembangunan proyek-proyek pemerintah (sarana jalan dan jembatan), dan infrastruktur lainnya.

Tabel 4.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto, 2000-2007

Uraian	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nilai (Triliun Rp)								
ADH Berlaku	1,75	1,98	2,19	2,38	2,56	3,13	4,03	5,35
ADH Konstan 2000	1,75	1,87	1,99	1,91	2,04	2,31	2,65	3,15
Persentase								
Laju Pertumbuhan 1)	-	7,24	6,04	-3,72	6,74	13,11	14,70	19,08
Kontribusi 2)	16,32	16,83	16,77	16,78	16,30	16,69	18,76	22,02

1) Perhitungan atas dasar harga konstan

2) Perhitungan atas dasar harga berlaku

Kontribusi komponen PMTB terhadap pembentukan PDRB menurut penggunaan selama tujuh tahun terakhir selalu meningkat. Selama periode 2000-2005, kontribusinya terhadap PDRB berkisar antara 16-17 persen, tahun 2006 meningkat menjadi sebesar 18,76 persen, dan tahun 2007 kontribusinya telah mencapai 22,02 persen.

Laju pertumbuhan komponen PMTB selama periode 2000-2007 berfluktuatif dari tahun ke tahun. Nilai tambah bruto komponen PMTB tahun 2001 secara riil tumbuh sebesar 7,24 persen. Tahun 2002, laju pertumbuhannya melambat menjadi sebesar 6,04 persen dan berkontraksi sebesar minus 3,72 persen di tahun 2003. Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, investasi fisik tumbuh 19,08 persen. Dari pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2007 yang sebesar 6,47 persen, sebagian besar bersumber dari PMTB, dengan sumbangan sebesar 3,58 persen.

4.5 Ekspor Dan Impor Barang dan Jasa

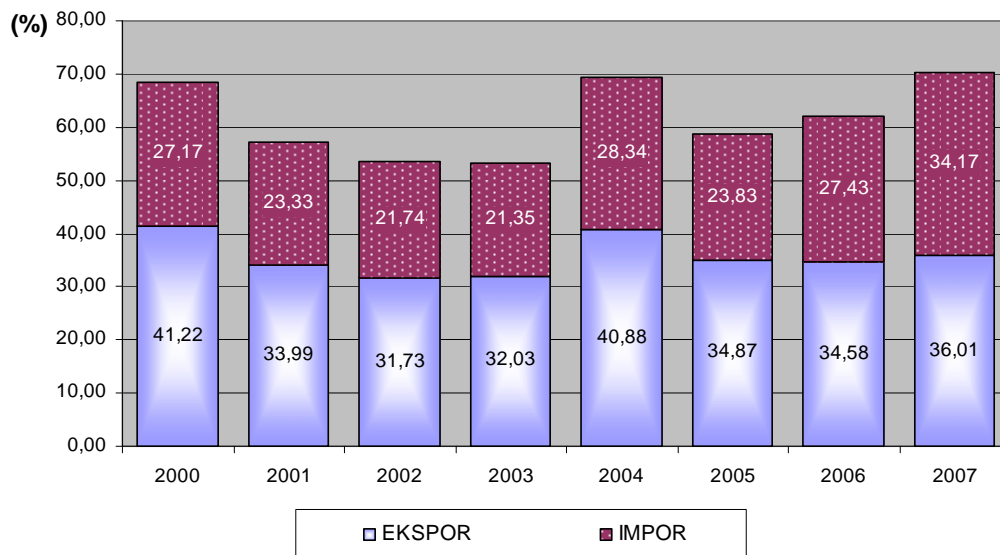
Perdagangan barang dan jasa Sulawesi Utara selama kurun waktu 2000-2007 selalu mengalami surplus. Kondisi surplus perdagangan terlihat dari total ekspor perdagangan (dalam negeri dan luar negeri) yang lebih besar dibandingkan dengan total impornya. Perdagangan luar negeri lebih didominasi oleh kegiatan ekspor, sedangkan untuk perdagangan dalam negeri (antar provinsi/daerah) lebih didominasi oleh kegiatan impor. Hal ini menunjukkan bahwa untuk beberapa komoditi, provinsi Sulawesi Utara masih bergantung pada daerah lain.

4.5.1 Ekspor Barang dan Jasa

Nilai tambah bruto untuk komponen ekspor barang dan jasa atas dasar harga berlaku tahun 2007 tercatat sebesar Rp 8,74 triliun (lebih tinggi dibandingkan tahun 2006 yang sebesar Rp 7,44 triliun) dan penggunaan PDRB Sulawesi Utara secara riil untuk ekspor tahun 2007 tercatat sebesar Rp 6,49 triliun, meningkat 5,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 6,14 triliun (Ekspor antar negara meningkat 6,79 persen dan antar daerah meningkat 3,97 persen). Berdasarkan data dari pelabuhan Bitung, tiga komoditi ekspor antar negara yang mendominasi adalah CNO CCO (minyak mentah dari kopra), bungkil sejenisnya dan bungkil dari kopra. Sementara tiga komoditi ekspor terbesar antar daerah adalah minyak solar/HSD (curah), barang campuran, dan beras.

Kontribusi ekspor terhadap PDRB menurut penggunaan selama periode 2000-2007 berfluktuatif berkisar antara 31 persen sampai 42 persen. Meskipun nilai ekspor umumnya mengalami kenaikan, namun kontribusinya terhadap pembentukan PDRB dalam beberapa tahun menurun yaitu dari 40,88 persen di tahun 2004, turun menjadi 34,87 persen di tahun 2005. Pada tahun 2006 kontribusinya kembali menurun menjadi sebesar 34,58, namun mengalami peningkatan di tahun 2007 menjadi sebesar 36,01 persen.

Laju pertumbuhan ekspor selama periode 2000-2007 juga berfluktuatif. Secara riil, nilai ekspor tahun 2007 tumbuh sebesar 5,76 persen, melambat dibandingkan tahun 2006 yang sebesar 14,16 persen. Sumbangan komponen ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2007 adalah sebesar 1,99 persen.



Gambar 4.6 Kontribusi Ekspor dan Impor Barang dan Jasa, 2000-2007

Tahun 2001, nilai ekspor secara riil terkontraksi sebesar minus 35,84 persen, kemudian pada tahun 2002 laju pertumbuhannya mengalami percepatan tetapi masih terkontraksi sebesar minus 0,15 persen. Memasuki tahun 2003, laju pertumbuhan ekspor meningkat menjadi sebesar 27,50 persen. Pertumbuhan ekspor tertinggi terjadi tahun 2004 yang mencapai 41,52 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2005 laju pertumbuhan ekspor melambat sebesar 5,45 persen dan di tahun 2006 pertumbuhan ekspor kembali meningkat menjadi 14,16 persen.

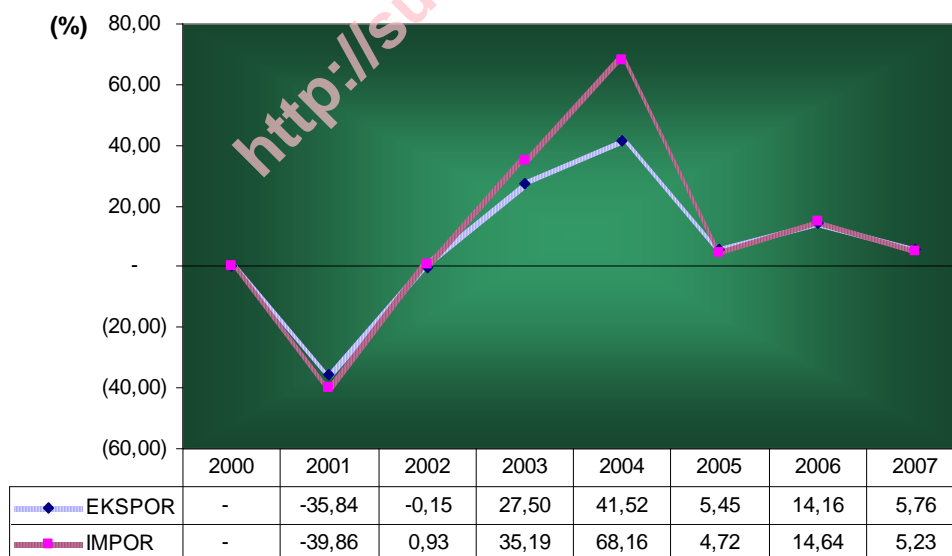
4.5.2 Impor Barang dan Jasa

Nilai impor barang dan jasa tahun 2007 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2006. Nilai tambah bruto yang digunakan untuk kegiatan impor atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp 5,90 triliun menjadi sebesar Rp 8,29 triliun dan secara riil meningkat dari Rp 4,82 triliun menjadi sebesar Rp 5,07 triliun, atau tumbuh sebesar 5,23 persen. Untuk kegiatan impor, perdagangan barang dan jasa antar daerah lebih mendominasi dibandingkan antar negara. Hal ini menunjukkan bahwa untuk beberapa komoditi, provinsi Sulawesi Utara masih sangat bergantung pada daerah/provinsi lain.

Nilai impor antar daerah secara riil meningkat dari Rp 4,24 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp 4,54 triliun di tahun 2007, atau tumbuh sebesar 7,20 persen. Komoditi impor terbesar antar daerah/provinsi adalah Bahan Bakar Minyak (BBM), semen & bahan bangunan lainnya, CPO (minyak mentah kelapa sawit), dan kopra.

Dilihat dari peranannya terhadap PDRB penggunaan, selama periode 2000-2007, komponen impor barang dan jasa memberikan sumbangan yang berfluktuatif dengan kisaran 20 persen sampai 35 persen. Kontribusi terbesar terjadi di tahun 2007 yakni sebesar 34,17 persen dan terkecil di tahun 2003, yakni sebesar 21,35 persen.

Pada tahun 2001 laju pertumbuhan impor secara riil mengalami penurunan sebesar minus 39,86 persen, namun di tahun 2002 impor tumbuh positif sebesar 0,93 persen. Kenaikan laju pertumbuhan impor juga terjadi di tahun 2003 yaitu sebesar 35,19 persen, tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2004, impor tumbuh sebesar 68,16 persen. Sama halnya dengan laju pertumbuhan ekspor yang melambat di tahun 2005 dan meningkat di tahun 2006, pertumbuhan impor tahun 2005 juga melambat sebesar 4,72 persen dan di tahun 2006 meningkat menjadi 14,64 persen. Di tahun 2007, pertumbuhannya kembali melambat menjadi sebesar 5,23 persen.



Gambar 4.6 Laju Pertumbuhan Ekspor dan Impor Barang dan Jasa, 2000-2007

TABEL 1.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGGUNAAN
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU, 2000-2007
 (Dalam Jutaan Rupiah)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KONSUMSI RUMAH TANGGA	5.060.649	5.617.206	6.390.989	6.769.134	7.242.990	8.519.976	9.825.828	11.352.780
Makanan	3.250.532	3.444.920	3.851.592	3.840.859	4.227.089	4.963.426	5.892.650	6.798.350
Non Makanan	1.810.117	2.172.286	2.539.397	2.928.275	3.015.900	3.556.550	3.933.178	4.554.430
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	385.944	422.112	461.488	432.732	494.136	566.922	620.239	775.835
KONSUMSI PEMERINTAH	1.619.840	2.301.732	2.479.990	2.953.305	3.314.435	4.318.414	5.149.748	5.973.214
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	1.746.800	1.984.808	2.193.217	2.376.640	2.564.253	3.132.546	4.034.437	5.346.053
PERUBAHAN STOK	383.743	209.613	243.364	117.436	138.329	154.886	335.640	380.070
EKSPOR	4.411.490	4.008.446	4.149.253	4.536.081	6.430.289	6.542.450	7.437.053	8.741.527
Antar Negara	1.784.444	209.372	634.783	1.519.575	3.385.856	3.833.739	4.064.179	4.792.331
Antar Pulau/Provinsi	2.627.046	3.799.074	3.514.470	3.016.506	3.044.433	2.708.711	3.372.874	3.949.196
DIKURANGI IMPOR	2.907.334	2.750.972	2.842.433	3.023.449	4.456.682	4.471.713	5.899.251	8.295.450
Antar Negara	152.132	20.115	137.398	154.426	188.829	107.592	577.221	615.275
Antar Pulau/Provinsi	2.755.202	2.730.857	2.705.035	2.869.023	4.267.853	4.364.122	5.322.030	7.680.175
P D R B	10.701.133	11.792.946	13.075.868	14.161.879	15.727.749	18.763.479	21.503.695	24.274.030

TABEL 2.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGGUNAAN
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000, 2000-2007
 (Dalam Jutaan Rupiah)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KONSUMSI RUMAH TANGGA	5.060.649	5.155.555	5.330.408	5.367.063	5.634.527	5.699.927	5.812.205	5.962.824
Makanan	3.250.532	3.324.135	3.441.457	3.466.351	3.646.968	3.688.305	3.777.265	3.884.540
Non Makanan	1.810.117	1.831.419	1.888.951	1.900.713	1.987.559	2.011.622	2.034.940	2.078.284
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	385.944	398.853	417.150	361.288	374.595	396.031	414.866	443.998
KONSUMSI PEMERINTAH	1.619.840	2.233.780	2.276.666	2.686.513	2.882.117	3.062.705	3.150.981	3.211.696
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	1.746.800	1.873.344	1.986.430	1.912.481	2.041.440	2.309.136	2.648.554	3.153.783
PERUBAHAN STOK	383.743	185.498	219.247	107.739	128.950	100.575	182.771	210.821
EKSPOR	4.411.490	2.830.460	2.826.319	3.603.543	5.099.847	5.377.682	6.139.412	6.492.962
Antar Negara	1.784.444	178.897	619.602	1.593.534	3.080.061	3.537.962	3.899.574	4.164.284
Antar Pulau/Provinsi	2.627.046	2.651.563	2.206.717	2.010.009	2.019.786	1.839.720	2.239.839	2.328.677
DIKURANGI IMPOR	2.907.334	1.748.513	1.764.757	2.385.834	4.011.975	4.201.506	4.816.718	5.068.781
Antar Negara	152.132	17.187	134.112	161.942	194.798	59.244	580.557	527.485
Antar Pulau/Provinsi	2.755.202	1.731.326	1.630.645	2.223.892	3.817.177	4.142.261	4.236.161	4.541.297
PDRB	10.701.133	10.928.976	11.291.463	11.652.793	12.149.501	12.744.550	13.532.072	14.407.302

TABEL 3.

DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGGUNAAN
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU, 2000-2007
 (PERSEN)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KONSUMSI RUMAH TANGGA	47,29	47,63	48,88	47,80	46,05	45,41	45,69	46,77
Makanan	30,38	29,21	29,46	27,12	26,88	26,45	27,40	28,01
Non Makanan	16,92	18,42	19,42	20,68	19,18	18,95	18,29	18,76
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	3,61	3,58	3,53	3,06	3,14	3,02	2,88	3,20
KONSUMSI PEMERINTAH	15,14	19,52	18,97	20,85	21,07	23,01	23,95	24,61
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	16,32	16,83	16,77	16,78	16,30	16,69	18,76	22,02
PERUBAHAN STOK	3,59	1,78	1,86	0,83	0,88	0,83	1,56	1,57
EKSPOR	41,22	33,99	31,73	32,03	40,88	34,87	34,58	36,01
Antar Negara	16,68	1,78	4,85	10,73	21,53	20,43	18,90	19,74
Antar Pulau/Provinsi	24,55	32,21	26,88	21,30	19,36	14,44	15,69	16,27
DIKURANGI IMPOR	27,17	23,33	21,74	21,35	28,34	23,83	27,43	34,17
Antar Negara	1,42	0,17	1,05	1,09	1,20	0,57	2,68	2,53
Antar Pulau/Provinsi	25,75	23,16	20,69	20,26	27,14	23,26	24,75	31,64
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

TABEL 4.

DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGGUNAAN
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000, 2000-2007
 (PERSEN)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KONSUMSI RUMAH TANGGA	47,29	47,17	47,21	46,06	46,38	44,72	40,34	41,39
Makanan	30,38	30,42	30,48	29,75	30,02	28,94	27,91	26,96
Non Makanan	16,92	16,76	16,73	16,31	16,36	15,78	15,04	14,43
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	3,61	3,65	3,69	3,10	3,08	3,11	3,07	3,08
KONSUMSI PEMERINTAH	15,14	20,44	20,16	23,05	23,72	24,03	23,29	22,29
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	16,32	17,14	17,59	16,41	16,80	18,12	19,57	21,89
PERUBAHAN STOK	3,59	1,70	1,94	0,92	1,06	0,79	1,35	1,46
EKSPOR	41,22	25,90	25,03	30,92	41,98	42,20	45,37	45,07
Antar Negara	16,68	1,64	5,49	13,68	25,35	27,76	28,82	28,90
Antar Pulau/Provinsi	24,55	24,26	19,54	17,25	16,62	14,44	16,55	16,16
<u>DIKURANGI</u> IMPOR	27,17	16,00	15,63	20,47	33,02	32,97	35,59	35,18
Antar Negara	1,42	0,16	1,19	1,39	1,60	0,46	4,29	3,66
Antar Pulau/Provinsi	25,75	15,84	14,44	19,08	31,42	32,50	31,30	31,52
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

TABEL 5.

INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGGUNAAN
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU (2000=100)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KONSUMSI RUMAH TANGGA	100	111,00	126,29	133,76	143,12	168,36	194,16	224,33
Makanan	100	105,98	118,49	118,16	130,04	152,70	181,28	209,15
Non Makanan	100	120,01	140,29	161,77	166,61	196,48	217,29	251,61
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	100	109,37	119,57	112,12	128,03	146,89	160,71	201,02
KONSUMSI PEMERINTAH	100	142,10	153,10	182,32	204,61	266,60	317,92	368,75
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	100	113,63	125,56	136,06	146,80	179,33	230,96	306,05
PERUBAHAN STOK	100	54,62	63,42	30,60	36,05	40,36	87,46	99,04
EKSPOR	100	90,86	94,06	102,82	145,76	148,30	168,58	198,15
Antar Negara	100	11,73	35,57	85,16	189,74	214,84	227,76	268,56
Antar Pulau/Provinsi	100	144,61	133,78	114,83	115,89	103,11	128,39	150,33
DIKURANGI IMPOR	100	94,62	97,77	103,99	153,29	153,81	202,91	285,33
Antar Negara	100	13,22	90,31	101,51	124,12	70,72	379,42	404,43
Antar Pulau/Provinsi	100	99,12	98,18	104,13	154,90	158,40	193,16	278,75
P D R B	100	110,20	122,19	132,34	146,97	175,34	200,95	226,84

TABEL 6.

INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGGUNAAN
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (2000=100)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KONSUMSI RUMAH TANGGA	100	101,88	105,33	106,05	111,34	112,63	114,85	117,83
Makanan	100	102,26	105,87	106,64	112,20	113,47	116,20	119,50
Non Makanan	100	101,18	104,36	105,00	109,80	111,13	112,42	114,81
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	100	103,34	108,09	93,61	97,06	102,61	107,49	115,04
KONSUMSI PEMERINTAH	100	137,90	140,55	165,85	177,93	189,07	194,52	198,27
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	100	107,24	113,72	109,48	116,87	132,19	151,62	180,55
PERUBAHAN STOK	100	48,34	57,13	28,08	33,60	26,21	47,63	54,94
EKSPOR	100	64,16	64,07	81,69	115,60	121,90	139,17	147,18
Antar Negara	100	10,03	34,72	89,30	172,61	198,27	218,53	233,37
Antar Pulau/Provinsi	100	100,93	84,00	76,51	76,88	70,03	85,26	88,64
DIKURANGI IMPOR	100	60,14	60,70	82,06	138,00	144,51	165,67	174,34
Antar Negara	100	11,30	88,16	106,45	128,05	38,94	381,61	346,73
Antar Pulau/Provinsi	100	62,84	59,18	80,72	138,54	150,34	153,75	164,83
P D R B	100	102,13	105,52	108,89	113,53	119,10	126,45	134,63

TABEL 7.

INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGGUNAAN
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU
 (TAHUN SEBELUMNYA = 100)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KONSUMSI RUMAH TANGGA	100	111,00	113,78	105,92	107,00	117,63	115,33	115,54
Makanan	100	105,98	111,80	99,72	110,06	117,42	118,72	115,37
Non Makanan	100	120,01	116,90	115,31	102,99	117,93	110,59	115,80
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	100	109,37	109,33	93,77	114,19	114,73	109,40	125,09
KONSUMSI PEMERINTAH	100	142,10	107,74	119,09	112,23	130,29	119,25	115,99
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	100	113,63	110,50	108,36	107,89	122,16	128,79	132,51
PERUBAHAN STOK	100	54,62	116,10	48,26	117,79	111,97	216,70	113,24
EKSPOR	100	90,86	103,51	109,32	141,76	101,74	113,67	117,54
Antar Negara	100	11,73	303,18	239,38	222,82	113,23	106,01	117,92
Antar Pulau/Provinsi	100	144,61	92,51	85,83	100,93	88,97	124,52	117,09
DIKURANGI IMPOR	100	94,62	103,32	106,37	147,40	100,34	131,92	140,62
Antar Negara	100	13,22	683,06	112,39	122,28	56,98	536,49	106,59
Antar Pulau/Provinsi	100	99,12	99,05	106,06	148,76	102,26	121,95	144,31
P D R B	100	110,20	110,83	108,31	111,06	119,30	114,60	112,88

TABEL 8.

INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGGUNAAN
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (2000=100)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KONSUMSI RUMAH TANGGA	100	101,88	103,39	100,69	104,98	101,16	101,97	102,59
Makanan	100	102,26	103,53	100,72	105,21	101,13	102,41	102,84
Non Makanan	100	101,18	103,14	100,62	104,57	101,21	101,16	102,13
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	100	103,34	104,59	86,61	103,68	105,72	104,76	107,02
KONSUMSI PEMERINTAH	100	137,90	101,92	118,00	107,28	106,27	102,88	101,93
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	100	107,24	106,04	96,28	106,74	113,11	114,70	119,08
PERUBAHAN STOK	100	48,34	118,19	49,14	119,69	78,00	181,73	115,35
EKSPOR	100	64,16	99,85	127,50	141,52	105,45	114,16	105,76
Antar Negara	100	10,03	346,35	257,19	193,28	114,87	110,22	106,79
Antar Pulau/Provinsi	100	100,93	83,22	91,09	100,49	91,08	121,75	103,97
DIKURANGI IMPOR	100	60,14	100,93	135,19	168,16	104,72	114,64	105,23
Antar Negara	100	11,30	780,31	120,75	120,29	30,41	979,94	90,86
Antar Pulau/Provinsi	100	62,84	94,18	136,38	171,64	108,52	102,27	107,20
P D R B	100	102,13	103,32	103,20	104,26	104,90	106,18	106,47

TABEL 9.

INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGGUNAAN

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KONSUMSI RUMAH TANGGA	100,00	108,95	119,90	126,12	128,55	149,48	169,06	190,39
Makanan	100,00	103,63	111,92	110,80	115,91	134,57	156,00	175,01
Non Makanan	100,00	118,61	134,43	154,06	151,74	176,80	193,28	219,14
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	100,00	105,83	110,63	119,77	131,91	143,15	149,50	174,74
KONSUMSI PEMERINTAH	100,00	103,04	108,93	109,93	115,00	141,00	163,43	185,98
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	100,00	105,95	110,41	124,27	125,61	135,66	152,33	169,51
PERUBAHAN STOK	100,00	113,00	111,00	109,00	107,27	154,00	183,64	180,28
EKSPOR	100,00	141,62	146,81	125,88	126,09	121,66	121,14	134,63
Antar Negara	100,00	117,03	102,45	95,36	109,93	108,36	104,22	115,08
Antar Pulau/Provinsi	100,00	143,28	159,26	150,07	150,73	147,23	150,59	169,59
<u>DIKURANGI</u> IMPOR	100,00	157,33	161,07	126,73	111,08	106,43	122,47	163,66
Antar Negara	100,00	117,04	102,45	95,36	96,94	181,61	99,43	116,64
Antar Pulau/Provinsi	100,00	157,73	165,89	129,01	111,81	105,36	125,63	169,12
P D R B	100,00	107,91	115,80	121,53	129,45	147,23	158,91	168,48

Tabel 10.

PERTUMBUHAN EKONOMI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGGUNAAN

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KONSUMSI RT	-	1,88	3,39	0,69	4,98	1,16	1,97	2,59
Makanan	-	2,26	3,53	0,72	5,21	1,13	2,41	2,84
Non Makanan	-	1,18	3,14	0,62	4,57	1,21	1,16	2,13
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	-	3,34	4,59	-13,39	3,68	5,72	4,76	7,02
KONSUMSI PEMERINTAH	-	37,90	1,92	18,00	7,28	6,27	2,88	1,93
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	-	7,24	6,04	-3,72	6,74	13,11	14,70	19,08
PERUBAHAN STOK	-	-51,66	18,19	-50,86	19,69	-22,00	81,73	15,35
EKSPOR	-	-35,84	-0,15	27,50	41,52	5,45	14,16	5,76
Antar Negara	-	-89,97	246,35	157,19	93,28	14,87	10,22	6,79
Antar Pulau/Provinsi	-	0,93	-16,78	-8,91	0,49	-8,92	21,75	3,97
<u>DIKURANGI</u> IMPOR	-	-39,86	0,93	35,19	68,16	4,72	14,64	5,23
Antar Negara	-	-88,70	680,31	20,75	20,29	-69,59	879,94	-9,14
Antar Pulau/Provinsi	-	-37,16	-5,82	36,38	71,64	8,52	2,27	7,20
P D R B	-	2,13	3,32	3,20	4,26	4,90	6,18	6,47

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

Jl. 17 Agustus Manado 95119

Telp. : (0431)847044, Fax. : (0431) 862204

Homepage : <http://sulut.bps.go.id>, E-mail : bps7100@bps.go.id